

---

**ANALYTIC HIERARCHY PROCESS DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
TEMPAT KHUSUS PARKIR DI KABUPATEN CILACAP****Shadu Satwika Wijaya<sup>1\*</sup>, Slamet Rosyadi<sup>2</sup>, Zaula Rizqi Atika<sup>3</sup>, Chamid Sutikno<sup>4</sup>**<sup>1,2</sup>Universitas Jenderal Soedirman<sup>3,4</sup>Universitas Nahdlatul Ulama PurwokertoE-mail: <sup>1</sup>shadu.satwika@unsoed.ac.id, <sup>2</sup>slametrosyadi@unsoed.ac.id, <sup>3</sup>zr.atika@unupurwokerto.ac.id,<sup>4</sup>sutiknochamid@gmail.com**\*Penulis Korespondensi**

---

**ABSTRAK**

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan core bussiness dari administrasi publik. Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah daerah dituntut untuk semakin memperhatikan kebutuhan publik yang salah satu di antaranya adalah kebutuhan akan transportasi. Untuk itu, dibutuhkan pengambilan keputusan yang akurat demi menjamin efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi publik. Cilacap semakin berkembang ke arah wilayah industri dan jasa sehingga mobilitas masyarakat semakin tinggi seiring dengan pergerakan ekonomi. Oleh karena itu, terjadi penumpukan dan keramaian di beberapa wilayah yang menjadi simpul aglomerasi yang diakibatkan oleh adanya parkir kendaraan di badan jalan. Untuk mencegah semakin meningkatnya penumpukan tersebut, maka pemerintah daerah perlu merespon dengan menyediakan layanan tempat khusus parkir (gedung parkir). Namun, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki, maka pemerintah daerah harus mengambil keputusan untuk memprioritaskan pembangunan layanan tempat khusus parkir (gedung parkir) di lokasi yang paling layak untuk dibangun. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prioritas lokasi untuk tempat khusus parkir di beberapa wilayah aglomerasi Cilacap yaitu Majenang, Kroya dan Cilacap Kota. Dengan menggunakan metode Analytic Hierarchy Process dapat diperoleh hasil dengan akurasi yang tinggi dalam menentukan prioritas lokasi layanan tempat khusus parkir di Cilacap.

**Kata Kunci:** Pelayanan Publik, Mobilitas Publik Transportasi, Pengambilan Keputusan, Proses Hirarki Analitik

---

**ANALYTIC HIERARCHY PROCESS IN DECISION MAKING TO DETERMINE  
LOCATION OF PARKING BUILDING IN CILACAP****ABSTRACT**

The implementation of public services is the core business of public administration. In an effort to provide public services, local governments are required to pay more attention to public needs, one of which is the need for transportation. For this reason, accurate decision making is needed to ensure the effectiveness and efficiency of public administration. Cilacap is increasingly developing towards an industrial and service area so that community mobility is getting higher in line with economic movements. Therefore, there is a buildup and crowds in several areas that become agglomeration nodes caused by the presence of parking vehicles on the road. To prevent this buildup from increasing, local governments need to respond by providing parking building services. However, given the limited budget they have, the local government must make a decision to prioritize the construction of parking building services in the most feasible locations to be built. For this reason, this study aims to identify priority locations for special parking spaces in several Cilacap agglomeration areas, namely Majenang, Kroya and Cilacap Kota. Using by the Analytic Hierarchy Process method, results with high accuracy can be obtained in determining the priority of parking building service locations in Cilacap.

**Keywords:** Public Service, Transportation, Public Mobility, Decision Making, Analytic Hierarchy Process.

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintah yang menjadi *core bussiness* dari administrasi publik (Denhardt & Denhardt, 2015; Robinson, 2015). Sementara itu, tingkat ketercapaian pemenuhannya berbanding lurus dengan tingkat ketersediaan fasilitasnya. Untuk itu, Pemerintah daerah senantiasa dituntut untuk terus berupaya mewujudkan pelayanan publik (*public service*) yang sesuai dengan koridor *good governance*, yakni mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dengan paradigma baru (*the new paradigm*) yang menempatkan birokrasi sebagai abdi pelayan masyarakat (Denhardt & Denhardt, 2015). Salah satu mewujudkan peningkatan pelayanan publik di bidang transportasi, maka pemerintah dapat menyelenggarakan tempat khusus parkir untuk masyarakat umum di beberapa wilayah yang keramaian lalu lintasnya tinggi.

Kabupaten Cilacap sebagai salah satu daerah poros ekonomi di Pulau Jawa, maka transportasi di Wilayah Cilacap terbilang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cilacap disebutkan bahwa: (a) Penyelenggaraan parkir untuk umum di dalam ruang milik jalan dapat diselenggarakan oleh Dinas dan/atau Badan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) Penyelenggaraan parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat diselenggarakan oleh Dinas, Badan Hukum dan/atau perorangan Warga Negara Indonesia berupa usaha khusus perparkiran atau penunjang usaha pokok.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Cilacap sebagai dasar penetapan tarif retribusinya. Peraturan tersebut tentunya perlu diimbangi dengan keberadaan tempat parkir yang layak. Parkir sendiri merupakan tempat pemberhentian kendaraan untuk sementara waktu. Tempat-tempat umum seperti pusat perdagangan, perkantoran, dan tempat hiburan merupakan tempat yang sangat dibutuhkan terhadap sarana ruang parkir yang memadai. Ketersediaan ruang parkir yang memadai dapat dijadikan solusi terhadap beberapa masalah, seperti antrian, tundaan atau kemacetan serta gangguan terhadap kelancaran lalu lintas. Suatu pusat kegiatan akan menimbulkan aktivitas parkir kendaraan. Bangkitan parkir ini akan membangkitkan masalah antara lain: (1) Bangkitan tidak dapat tertampung oleh fasilitas parkir diluar badan jalan yang tersedia, sehingga meluap ke badan jalan. Luapan parkir di badan jalan akan mengakibatkan gangguan kelancaran lalu lintas; (2) Tidak tersedianya fasilitas parkir di luar badan jalan sehingga bangkitan parkir secara otomatis memanfaatkan badan jalan untuk parkir. Seiring dengan pertumbuhan kendaraan di Kabupaten Cilacap dan dengan semakin berkembangnya *trend* pelayanan tempat khusus parkir, maka dibutuhkan keputusan terkait Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Cilacap. Hal ini tidak lain demi mewujudkan pelayanan parkir yang nyaman dan aman bagi para pengguna jasa parkir.

Untuk mengembangkan suatu keputusan dapat ditentukan dengan berbagai metode. Salah satu metode yang sering digunakan untuk menghadapi persoalan yang sifatnya *Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA)*. *Analytic Hierarchy Process (AHP)* adalah suatu metode pengambilan keputusan dengan melakukan perbandingan berpasangan antara kriteria pilihan dan juga perbandingan berpasangan antara pilihan yang ada. Permasalahan pengambilan keputusan dengan AHP umumnya dikomposisikan menjadi kriteria, dan alternatif pilihan. Struktur yang berhirarki, sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih, sampai pada subkriteria yang paling dalam.

*Analytic Hierarchy Process (AHP)* merupakan teknik pengambilan keputusan untuk masalah yang kompleks dan multiatribut (Saaty, 2016; Thakkar, 2021). *Analytic Hierarchy Process (AHP)* digunakan untuk mengukur skala rasio terbaik dan dikembangkan untuk menyusun suatu permasalahan ke dalam suatu hirarki yang selanjutnya dilakukan pembobotan berdasarkan persepsi pengambil keputusan. *Analytic Hierarchy Process (AHP)* digunakan pada keputusan: (a) Banyak kriteria/ Faktor/ Variabel; (b) Perencanaan; (c) Alokasi Sumber Daya; (d) Penentuan Prioritas. Adapun tahapan dalam proses pengambilan keputusan dengan menggunakan metode AHP:

Tahap 1: Penentuan Kriteria dan Pembobotan (Hirarki)

- a) Penentuan kriteria penilaian dan rubrik pemilihan alternatif terbaik
- b) Penentuan indikator dan operasionalisasi variabel
- c) Penentuan bobot dan jenjang dari setiap variasi nilai

Tahap 2: Pengembangan dan Perbandingan Alternatif

- a) Pengembangan peluang dan alternatif
- b) Perbandingan setiap alternatif berdasarkan setiap variasi nilai
- c) Pemberian bobot untuk setiap pilihan alternatif
- d) Penjumlahan sub total skor untuk masing-masing variasi nilai

Tahap 3: Pemilihan Alternatif Terbaik

- a) Penjumlahan total skor untuk masing-masing alternatif
- b) Penentuan pilihan terbaik dengan memperhatikan rubrik pemilihan alternatif terbaik
- c) Penarikan kesimpulan akhir tentang alternatif terbaik

Untuk itu masalah penelitian yang dirumuskan dalam penelitian ini, adalah lokasi manakah yang dapat diprioritaskan sebagai tempat khusus parkir di Kabupaten Cilacap dengan menggunakan teknik *Analytic Hierarchy Process (AHP)* dalam pengambilan keputusan? Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prioritas lokasi untuk tempat khusus parkir di Kabupaten Cilacap dengan menggunakan teknik AHP dalam pengambilan keputusan.

## METODE

Metode penelitian senantiasa disesuaikan dengan tujuan penelitian (Creswell & Creswell, 2018). Untuk menjawab tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran dalam penelitian ini adalah titik-titik tertentu di Kabupaten Cilacap yang dianggap membutuhkan tempat khusus parkir yaitu: (a) Wilayah Kecamatan Kroya; (b) Wilayah Cilacap Kota; (c) Wilayah Kecamatan Majenang. Lokasi tersebut dipilih atas dasar potensi keramaian transportasi yang terjadi di Kabupaten Cilacap. Metode yang digunakan untuk menentukan kelayakan adalah teknik analisis *Analytic Hierarchy Process* (AHP) yaitu suatu metode pengambilan keputusan dengan melakukan perbandingan berpasangan antara kriteria pilihan dan juga perbandingan berpasangan antara pilihan yang ada. Permasalahan pengambilan keputusan dengan AHP umumnya dikomposisikan menjadi kriteria, dan alternatif pilihan.

Data diperoleh menggunakan metode data *mining* dalam *social science* (Attewell & Monaghan, 2015), berdasarkan data sekunder dan arsip/ dokumentasi, serta observasi lapangan, wawancara dengan pihak terkait yang meliputi unsur pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Adapun fokus penelitian ini adalah seperti pada Tabel 1.

Tabel 1: Fokus kajian

| ASPEK            | INDIKATOR  |
|------------------|--|
| Kelayakan Lokasi | Zonasi<br>Kondisi Eksisting<br>Rencana Kawasan Strategis   |
| Aksesibilitas    | Ketersediaan Lahan<br>Keterjangkauan Lahan<br>Visibilitas Lahan                                    |
| Transportasi     | Tipe Jalan Sekitar<br>Arus Lalu Lintas Jalan Sekitar<br>Tundaan dan Hambatan Samping Jalan Sekitar |
| Lingkungan       | Akseptabilitas Sosial<br>Penerimaan Pengelola Parkir<br>Penerimaan Pusat Kegiatan                  |

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian melakukan wawancara dengan berbagai pihak, antara lain: pejabat pemerintah setempat, petugas pasar, juru parkir, pedagang/ *business stakeholder*, pengguna trotoar, serta masyarakat pengguna parkir. Selain wawancara, tim penelitian juga melakukan observasi terhadap kondisi pusat kegiatan, keberadaan parkir, kepadatan jalan, dan pola perilaku masyarakat secara umum terhadap perparkiran. Lokasi yang disurvei adalah sebagaimana yang telah ditentukan, yaitu di Kecamatan Kroya, Kecamatan Majenang dan Cilacap Kota. Adapun titik survei pada masing-masing lokasi ditentukan berdasarkan

ketersediaan lahan dan tingkat kemacetan arus lalu lintasnya. Berdasarkan hasil pengamatan, maka titik survei yang ditentukan pada masing-masing lokasi adalah

- Regional Kroya : Pasar Induk Kroya
- Regional Cilacap Kota : Pasar Tanjungsari (Belakang Terminal Cilacap)
- Regional Majenang : Taman Kota/ alun-alun Majenang

### 1. Aspek Kelayakan Lokasi

Secara umum setiap lokasi yang ditentukan untuk menjadi lokasi tempat khusus parkir adalah lokasi yang paling layak di daerahnya masing-masing. Untuk menentukan kelayakan dari aspek kelayakan lokasi, digunakan empat indikator, yakni zonasi, kepemilikan lahan, kondisi eksisting, dan rencana wilayah strategis.

Tabel 2. Penilaian Lokasi dari Aspek Kelayakan Lokasi

| No          | Sub Aspek         | Nilai Maks | Lokasi                |                        |              |
|-------------|-------------------|------------|-----------------------|------------------------|--------------|
|             |                   |            | Kroya                 | Cilacap Kota           | Majenang     |
| 1           | Zonasi            | 1          | Kuning<br>1           | Kuning<br>1            | Kuning<br>1  |
| 2           | Kepemilikan Lahan | 1          | PT KAI<br>0,5         | Pemda<br>1             | Pemda<br>1   |
| 3           | Kondisi Eksisting | 1          | Pasar<br>0,6          | Bangunan<br>1          | Taman<br>0,3 |
| 4           | Rencana Strategis | 1          | Pemindahan pasar<br>1 | Pemindahan gedung<br>1 | -<br>0       |
| Nilai Total |                   | 4          | 3,1                   | 4                      | 2,3          |

Dari aspek zonasi, seluruhnya berada di zona kuning (aman), yaitu zona tempat pemukiman warga dan pertokoan. Namun demikian lokasi di Cilacap Kota dianggap lebih layak karena beberapa pertimbangan, yaitu:

- a. Aspek kepemilikan lahan, lahan Disdukcapil adalah lahan milik pemerintah. Hal ini juga berlaku untuk taman kota di Majenang. Berbeda dengan pasar burung di Kroya, lahan yang ditawarkan adalah milik PT KAI. Aspek kepemilikan lahan sangat penting dan perlu diperhatikan berkaitan dengan upaya pembebasan lahan. Lokasi di Cilacap Kota dan Majenang akan lebih mudah upaya pembebasannya dibandingkan dengan lokasi yang ada di Kroya.
- b. Kondisi eksisting, lahan Disdukcapil saat ini dipenuhi dengan gedung untuk pelayanan kependudukan dan catatan sipil masyarakat. Hal ini dianggap lebih unggul dibandingkan dengan lahan yang lain. Taman Kota Majenang lahannya digunakan untuk area bermain/ hiburan masyarakat serta paru-paru kota. Begitu juga dengan pasar hewan, digunakan untuk ruko-ruko pedagang serta aktifitas perdagangan pasar. Penggunaan lahan sangat berpengaruh terhadap rencana pembangunan. Lahan Disdukcapil dianggap lebih memungkinkan untuk dialihfungsikan menjadi tempat khusus parkir, karena tidak akan merubah fungsi

lahan bagi masyarakat (sama-sama untuk bangunan). Dampak dari alih fungsi gedung justru dianggap lebih efektif karena fungsi gedung saat ini dianggap kurang layak untuk menyelenggarakan pelayanan kependudukan dan catatan sipil. Berbeda halnya dengan fungsi taman kota di majenang dan pasar burung yang ada di Kroya. Perubahan fungsi taman kota menjadi lahan parkir akan menghilangkan fungsi area bermain bagi masyarakat dan menghilangkan fungsi paru-paru kota, yang mana pemindahan itu lebih sulit dilakukan karena berkaitan dengan minat dan kebutuhan masyarakat. Begitu juga dengan fungsi pasar burung di Kroya, pemindahan lokasi pasar burung justru akan mendapatkan perlawanan yang tinggi dari masyarakat.

- c. Rencana Strategis, bahwa ada wacana yang berkembang pada masyarakat bahwa gedung Disdukcapil akan dipindahkan ke tempat lain yang lebih *representative*. Begitu juga dengan Pasar Burung Kroya, yang rencananya akan dipindahkan ke lokasi dekat Terminal Baru Kroya untuk memaksimalkan fungsi terminal. Adapun Taman Kota Majenang, belum ada wacana apapun terkait dengan perencanaan strategis wilayah

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka lokasi di Cilacap Kota mendapatkan nilai yang lebih tinggi (4) daripada lokasi di Majenang (2,3) dan Kroya (3,1)

**2. Aspek Transportasi**

Pemilihan kelayakan lokasi dari aspek transportasi ditentukan dengan melakukan penilaian terhadap tiga indikator, yaitu status tipe jalan, arus lalu lintas dan tundaan & hambatan samping jalan.

Tabel 3: Penilaian Lokasi dari Aspek Transportasi

| No          | Sub Aspek          | Nilai Maks | Kroya                  | Lokasi Cilacap Kota        | Majenang                  |
|-------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1           | Status Tipe Jalan  | 1          | Jl. A. Yani (Provinsi) | Jl. Kalimantan (Kabupaten) | Jl. Diponegoro (Nasional) |
|             |                    |            | 1                      | 0,5                        | 1                         |
| 2           | Arus Lalu Lintas   | 1          | 0,50 smp/jam           | 0,41 smp/jam               | 0,44 smp/jam              |
|             |                    |            | 1                      | 0,6                        | 0,8                       |
| 3           | Tundaan & Hambatan | 1          | 619,6 per 200m/jam     | 1.805 per 200m/jam         | 630,2 per 200m/jam        |
|             |                    |            | 0,3                    | 1                          | 0,4                       |
| Nilai Total |                    | 3          | 2,3                    | 2,1                        | 2,2                       |

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa lokasi di Kroya lebih tinggi daripada Majenang dan Cilacap Kota. Pertama, dari indikator tipe jalan sekitar, diketahui bahwa Jl.

Kalimantan (Cilacap Kota) berstatus Jalan Kabupaten. Padahal, status jalan berkaitan erat dengan kewenangan pengelolaan parkir bahu jalan. Artinya, pada dasarnya parkir di bahu jalan untuk area Jl. Kalimantan tidak menjadi masalah bagi pemerintah kabupaten, karena parkir tersebut masih dapat dikelola. Berbeda dengan lokasi yang lain, jalan provinsi ataupun nasional, tidak dapat dikelola, kecuali dengan membuat tempat parkir khusus.

Kedua, dari indikator arus lalu lintas jalan sekitar. Seluruh lokasi yang diajukan, berdasarkan penghitungan tingkat pelayanan jalan (*Level Of Service*), arus lalu lintasnya padat. Dari ketiga lokasi yang ditawarkan, lokasi di Kroya memiliki tingkat kepadatan arus lalu lintas yang tinggi. Ketiga, dari indikator tundaan dan hambatan samping jalan sekitar. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa lokasi di Cilacap Kota memiliki hambatan samping dan tundaan yang sangat tinggi.

### 3. Aspek Aksesibilitas

Lokasi yang layak adalah lokasi yang memiliki luasan lahan yang memadai, dekat dengan pusat kegiatan, dan mudah untuk diakses (keluar masuk lahan). Berdasarkan hasil survei dapat diketahui bahwa seluruh lokasi yang diajukan berada di tepian pusat kegiatan. Tidak ada satu pun yang berada di tengah-tengah pusat kegiatan.

Tabel 4: Penilaian Lokasi dari Aspek Aksesibilitas lahan

| No          | Sub Aspek      | Nilai<br>Maksimal | Lokasi               |                      |                      |
|-------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |                |                   | Kroya                | Cilacap Kota         | Majenang             |
| 1           | Luas Lahan     | 1                 | 1.465 m <sup>2</sup> | 2.942 m <sup>2</sup> | 1.982 m <sup>2</sup> |
|             |                |                   | 0,3                  | 1,0                  | 0,5                  |
| 2           | Jarak Terdekat | 0,5               | 35 m                 | 6 m                  | 5 m                  |
|             |                |                   | 0,1                  | 0,5                  | 0,5                  |
| 3           | Jarak Terjauh  | 0,5               | 191 m                | 132 m                | 237 m                |
|             |                |                   | 0,3                  | 0,5                  | 0,2                  |
| Nilai Total |                | 2                 | 0,7                  | 2,0                  | 1,2                  |

Nilai untuk aspek aksesibilitas adalah antara 0 – 2. Dengan menghitung *range* dari setiap sub aspek, maka ditetapkan bahwa Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa lokasi di Cilacap lebih layak untuk didirikan tempat khusus parkir, karena lahannya lebih luas, dan jaraknya dengan pusat kegiatan lebih dekat. Berkenaan dengan kemudahan dalam mengakses tempat khusus parkir, secara umum seluruhnya *acesable*, karena lokasi yang diajukan berada di tepi jalan, dan tidak tertutup dengan bangunan lainnya.

### 4. Aspek Lingkungan Sosial

Lokasi tempat khusus parkir yang tepat tentunya lokasi yang ramah lingkungan social, yakni diterima oleh masyarakat umum, pemanfaat lahan, serta *business stakeholder*.

Tabel 5: Penilaian Lokasi dari Aspek Lingkungan Sosial

| No           | Sub Aspek                   | Lokasi |              |          |     |
|--------------|-----------------------------|--------|--------------|----------|-----|
|              |                             | Kroya  | Cilacap Kota | Majenang |     |
| 1            | Akseptabilitas Sosial       | 0,4    | 1            | 3        | 2   |
|              |                             |        | 0,1          | 0,4      | 0,2 |
| 2            | Penerimaan Pengelola Parkir | 0,3    | 1            | 3        | 1   |
|              |                             |        | 0,1          | 0,3      | 0,1 |
| 3            | Penerimaan Pusat Kegiatan   | 0,3    | 2            | 2        | 1   |
|              |                             |        | 0,2          | 0,2      | 0,2 |
| <b>Total</b> |                             |        | 4            | 8        | 4   |
| <b>Nilai</b> |                             |        | 0,4          | 0,9      | 0,4 |

Keterangan:

- 1 : Kurang Menerima
- 2 : Menerima
- 3 : Sangat Menerima

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa lokasi di Cilacap Kota lebih diterima oleh masyarakat daripada lokasi yang lain, baik oleh masyarakat pengguna lahan, masyarakat pemanfaat lahan, ataupun *business stakeholder* (pusat kegiatan).

## SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prioritas lokasi untuk tempat khusus parkir di Kabupaten Cilacap dengan menggunakan teknik *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini, telah menunjukkan bahwa dari tiga nominasi lokasi, yakni: Kroya, Cilacap Kota, dan Majenang, berdasarkan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP), diperoleh hasil bahwa lokasi di Cilacap Kota merupakan lokasi yang paling layak untuk diselenggarakan tempat khusus parkir mengingat keterdukungan lokasi, aksesibilitas dan faktor lingkungan sosialnya.

## PERNYATAAN RESMI

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap. Dinas Perhubungan, Jurusan Administrasi Publik Universitas Jenderal Soedirman dan Program Studi Administrasi Publik Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.

## REFERENSI

- Attewell, P., & Monaghan, D. (2015). *Data Mining for the Social Sciences*. University of California Press <https://doi.org/10.1525/9780520960596>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods*. SAGE Publications, Inc.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). The New Public Service Revisited. *Public Administration Review*, 75(5), 664–672. <https://doi.org/10.1111/puar.12347>

- Robinson, M. (2015). From Old Public Administration to the New Public Service Implications for Public Sector Reform in Developing Countries. In *UNDP Global Centre for Public Service Excellence* (pp. 1–20). [http://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-development/English/Singapore Centre/PS-Reform\\_Paper.pdf](http://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-development/English/Singapore%20Centre/PS-Reform_Paper.pdf)
- Saaty, T. L. (2016). Applications and Theory of Analytic Hierarchy Process - Decision Making for Strategic Decisions. In *Applications and Theory of Analytic Hierarchy Process - Decision Making for Strategic Decisions*. <https://doi.org/10.5772/61387>
- Thakkar, J. J. (2021). Analytic Hierarchy Process (AHP). In *Studies in Systems, Decision and Control* (Vol. 336). [https://doi.org/10.1007/978-981-33-4745-8\\_3](https://doi.org/10.1007/978-981-33-4745-8_3)
- Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cilacap.
- Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No. 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Cilacap.